

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja, EPR (Employment to Population Ratio), Investasi PMDN, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi

5.1.1 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Kuncoro (2002), penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian, terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja, oleh karena itu penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai bentuk permintaan tenaga kerja.

Penyerapan tenaga kerja dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah, dengan maksud bahwa penyerapan tenaga kerja menunjukkan keberhasilan pembangunan suatu daerah secara keseluruhan. Perluasan penyerapan tenaga kerja sangat di perlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke pasar tenaga kerja, ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran (Nenik,2009).

Penyerapan tenaga kerja adalah hal yang paling mendasar pada kehidupan manusia, yang terdiri dari aspek sosial dan ekonomi, karena penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu faktor pendukung pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara berkembang dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang merata.

Masalah ketenagakerjaan masih menjadi problem yang belum dapat diselesaikan sampai saat ini, hal ini dikarenakan semakin tinggi angkatan kerja tentunya juga akan memerlukan lapangan kerja yang banyak juga, namun pada kenyataan lapangan pekerja tidak selalu tersedia. Semakin bertambahnya jumlah penduduk maka akan semakin banyak jumlah angkatan kerja yang ada, maka sumber daya manusia dan keterampilan yang baik menjadi modal utama bagi angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan yang layak sedangkan orang yang tidak mampu bersaing akan tersingkir dan berpotensi menjadi penganggur

Tabel 5.1 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Sumatera tahun 2010-2021 (juta/jiwa)

Provinsi	Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja tahun 2010-2021 di Pulau Sumatera												Rata-rata
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Aceh	1.766.670	1.886.530	1.922.014	1.956.525	2.026.734	2.086.762	2.053.153	2.158.099	2.240.378	2.362.705	2.411.352	2.388.367	2.104.941
perkembangan %	0,04	0,07	0,02	0,02	0,04	0,03	-0,02	0,05	0,04	0,05	0,02	-0,01	0,03
Sumatera Utara	5.890.066	6.015.423	6.254.370	6.221.646	6.363.923	6.171.374	6.165.549	6.286.296	7.122.114	7.367.029	7.295.545	7.029.733	6.515.256
perkembangan %	0,02	0,02	0,04	-0,01	0,02	-0,03	0,00	0,02	0,13	0,03	-0,01	-0,04	0,02
Sumatera Barat	2.101.027	2.146.576	2.250.370	2.298.377	2.344.466	2.332.151	2.427.354	2.465.974	2.663.327	2.623.039	2.747.820	2.584.119	2.415.383
perkembangan %	0,05	0,02	0,05	0,02	0,02	-0,01	0,04	0,02	0,08	-0,02	0,05	-0,06	0,02
Riau	2.178.403	2.405.729	2.481.457	2.693.642	2.661.327	2.774.245	2.801.290	2.947.871	3.085.817	3.079.405	3.106.731	3.124.739	2.778.388
perkembangan %	0,04	0,10	0,03	0,09	-0,01	0,04	0,01	0,05	0,05	0,00	0,01	0,01	0,03
Jambi	1.290.706	1.473.686	1.497.081	1.545.061	1.531.064	1.646.180	1.617.177	1.726.578	1.784.287	1.721.542	1.729.439	1.745.146	1.608.996
perkembangan %	0,01	0,14	0,02	0,03	-0,01	0,08	-0,02	0,07	0,03	-0,04	0,00	0,01	0,03
Sumatera Selatan	3.382.059	3.562.010	3.737.693	3.737.623	3.867.671	3.815.643	3.894.181	4.083.217	4.242.127	4.214.766	4.207.656	4.215.064	3.913.309
perkembangan %	0,06	0,05	0,05	0,00	0,03	-0,01	0,02	0,05	0,04	-0,01	0,00	0,00	0,02
Bengkulu	842.828	873.522	910.129	927.445	952.458	943.881	961.516	1.004.559	1.031.744	1.036.317	1.067.126	1.043.415	966.245
perkembangan %	0,03	0,04	0,04	0,02	0,03	-0,01	0,02	0,04	0,03	0,00	0,03	-0,02	0,02
Lampung	3.530.170	3.670.828	3.783.134	3.768.192	3.824.233	3.921.187	3.854.815	4.082.131	4.312.972	4.345.420	4.359.237	4.409.752	3.988.506
perkembangan %	0,01	0,04	0,03	0,00	0,01	0,03	-0,02	0,06	0,06	0,01	0,00	0,01	0,02
Bangka-Belitung	527.392	589.234	597.112	639.575	623.758	668.754	645.250	695.988	723.494	703.460	733.858	718.693	655.547
perkembangan %	0,00	0,12	0,01	0,07	-0,02	0,07	-0,04	0,08	0,04	-0,03	0,04	-0,02	0,03
Kepulauan Riau	653.012	778.730	812.463	848.009	845.088	814.427	830.438	985.619	1.035.236	1.024.868	1.062.004	1.037.133	893.919
perkembangan %	0,06	0,19	0,04	0,04	0,00	-0,04	0,02	0,19	0,05	-0,01	0,04	-0,02	0,05
Rata-rata perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja di 10 provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010-2021													0,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022 (Data Diolah)

Tabel 5.2 Rata-rata perkembangan penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera

Provinsi	Perkembangan %	Keterangan/Peringkat
Kepulauan Riau	0,05	1
Bangka-Belitung	0,03	2
Jambi	0,03	3
Riau	0,03	4
Aceh	0,03	5
Sumatera Utara	0,02	6
Sumatera Barat	0,02	7
Bengkulu	0,02	8
Sumatera Selatan	0,02	9
Lampung	0,02	10

Sumber:Badan Pusat Statistik Indonesia,2022 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa secara rata rata perkembangan penyerapan tenaga kerja di provinsi yang ada di Pulau Sumatera cenderung mengalami fluktuasi yang berbeda beda. Dapat di lihat dari beberapa provinsi di Pulau Sumatera penyerapan tenaga kerja paling tinggi berada di Provinsi Kepulauan Riau dimana secara rata rata dari tahun 2010-2021 penyerapan tenaga kerjanya mencapai 0,05 persen pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau telah menunjukkan progres pemulihan yang signifikan sejalan dengan peningkatan mobilitas dan aktivitas usaha masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

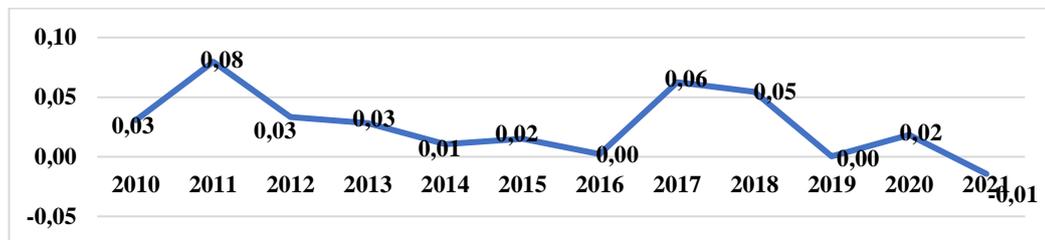
Dapat di lihat penyerapan tenaga kerja tertinggi di dominasi oleh lapangan pekerjaan industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, administrasi pemerintah, serta jasa pendidikan dan kesehatan, tidak hanya itu Kepulauan Riau terkenal dengan sumber daya alam mineral dan energi yang cukup besar dan bervariasi serta sangat terkenal akan hasil lautnya karena sebagian besar wilayahnya berbentuk kepulauan sehingga sangat banyak potensi laut yang ada di wilayah ini serta menjadi salah satu destinasi untuk para wisatawan mancanegara berlibur. Tidak hanya itu wilayah ini terkenal akan ekspor sumber daya mineralnya ke luar negeri yang menjadi salah satu sumber pendapatan provinsi tersebut.

Sementara itu di beberapa provinsi penyerapan tenaga kerja cenderung rendah contohnya seperti Provinsi Lampung penyerapan tenaga kerja masih rendah karna masih sedikitnya investasi yang di lakukan di daerah tersebut salah satu faktor

yang menyebabkan adalah infrastruktur jalan yang masih minim, infrastruktur pendidikan yang masih belum memadai khususnya bagi daerah-daerah terpencil, kemudian diketahui bahwa jumlah angkatan kerja di Provinsi Lampung mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, dimana terdapat ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan dan jumlah angkatan kerja yang tersedia. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya penyerapan tenaga kerja (Rusalia,2018).

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata rata perkembangan penyerapan tenaga kerja di 10 provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010-2021 sebesar 0,03 persen.

Gambar 5.1 Grafik perkembangan penyerapan tenaga kerja tahun 2010-2021 di Pulau Sumatera



Sumber: Badan Pusat Statistik,2022 (Data Diolah)

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa perkembangan penyerapan tenaga kerja di tahun 2010-2021 menunjukkan tren naik turun yang mana bisa dilihat penyerapan tenaga kerja tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 0,08 persen kemudian di susul tahun 2017 sebesar 0,06 persen dan pada tahun 2018 sebesar 0.05 persen. Terlihat salah satu faktor yang menyebabkan tingginya penyerapan tenaga kerja adalah tersedianya lapangan pekerjaan untuk di isi oleh angkatan kerja, dimana kondisi perekonomian dalam keadaan yang baik sehingga, secara tidak langsung konsumsi masyarakat meningkat dan mempengaruhi produksi yang pada akhirnya berpotensi untuk menyerap tenaga kerja, kemudian meningkatnya investasi pada tahun tersebut berpotensi terhadap meningkatnya penggunaan tenaga kerja.

Kemudian terlihat pada tahun 2021 perekonomian cenderung mengalami kontraksi penurunan yang hebat sebesar 0,01 persen akibat pandemi Covid 19 yang mana berpengaruh terhadap menurunnya investasi di Pulau Sumatera serta banyak perusahaan yang memutuskan mengurangi jumlah produksi serta melakukan PHK

terhadap beberapa karyawan sehingga berpengaruh terhadap menurunnya penyerapan tenaga kerja.

5.1.2 Perkembangan Employment to Population Ratio (EPR)

EPR adalah rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja, rasio yang tinggi menunjukkan kondisi sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio yang rendah berarti menunjukkan sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar tenaga kerja, seperti mereka yang menganggur atau tidak termasuk dalam angkatan kerja,

Rasio lapangan kerja terhadap populasi angkatan kerja adalah salah satu indikator utama pasar tenaga kerja. organisasi ketenagakerjaan internasional atau *International Labour Organization* (ILO) mengembangkan pedoman untuk memperkuat pemantauan pasar tenaga kerja melalui indikator utama pasar tenaga kerja, termasuk rasio lapangan kerja terhadap populasi angkatan kerja. Pada dasarnya rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan ekonomi dalam jangka panjang dan oleh karena itu digunakan banyak negara sebagai korelasi melihat tingkat kesempatan kerja, tingkat pengangguran, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pertumbuhan pekerjaan serta menangani isu-isu gender dalam kegiatan pasar tenaga kerja yang terkait erat dengan rasio ketergantungan, selain itu EPR dapat digunakan untuk membandingkan pertumbuhan lapangan kerja di setiap provinsi di Pulau Sumatera.

Agar dapat dicapai keadaan yang seimbang maka seharusnya semua angkatan kerja dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keinginan serta keterampilan yang dimiliki. Hal ini akan membawa konsekuensi bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keinginan serta keterampilan mereka. Dapat disimpulkan bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja baru.

Tabel 5.3 Tabel perkembangan Employment to Population Ratio (EPR) di 10 provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010-2021 (persen)

Provinsi	Perkembangan EPR Employment to Population Ratio, (Persen) tahun 2010-2021 di Pulau Sumatera												Rata-rata
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Aceh	91,40	91,38	92,06	91,66	93,25	92,27	91,87	92,61	93,46	94,52	94,60	93,70	92,73
Sumatera Utara	91,99	92,53	93,57	93,91	94,05	93,61	93,51	93,59	94,39	94,43	95,29	93,99	93,74
Sumatera Barat	92,43	92,49	93,51	93,61	93,68	94,01	94,19	94,20	94,32	94,62	94,75	93,33	93,76
Riau	92,79	92,49	94,71	95,81	95,01	93,28	94,06	94,24	94,45	94,64	95,08	95,04	94,30
Jambi	95,55	96,02	96,31	97,11	97,50	97,27	95,34	96,33	96,44	96,48	95,74	95,24	96,28
Sumatera Selatan	93,45	93,71	94,40	94,59	96,16	94,97	96,06	96,20	95,92	95,98	96,10	94,83	95,20
Bengkulu	95,94	96,54	97,82	97,90	98,38	96,79	96,16	97,19	97,37	97,59	96,92	96,28	97,07
Lampung	94,05	94,48	94,79	94,93	94,92	96,56	95,46	95,57	95,68	96,05	95,74	95,46	95,31
Bangka-Belitung	95,76	96,69	97,18	96,78	97,33	96,65	93,83	95,54	96,41	96,68	96,65	94,96	96,20
Kepulauan Riau	92,79	92,80	94,29	93,95	94,74	90,95	90,97	93,56	92,70	92,98	94,02	89,88	92,80
Rata-rata perkembangan EPR di 10 provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010-2021													94,74

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022 (Data Diolah)

Tabel 5.4 Rata-rata perkembangan Employment to Population Ratio (EPR) di Pulau Sumatera tahun 2010-2021

Provinsi	Perkembangan	Keterangan/Peringkat
Bengkulu	97,07	1
Jambi	96,28	2
Bangka-Belitung	96,20	3
Lampung	95,31	4
Sumatera Selatan	95,20	5
Riau	94,30	6
Sumatera Barat	93,76	7
Sumatera Utara	93,74	8
Kepulauan Riau	92,80	9
Aceh	92,73	10

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022 (Data Diolah)

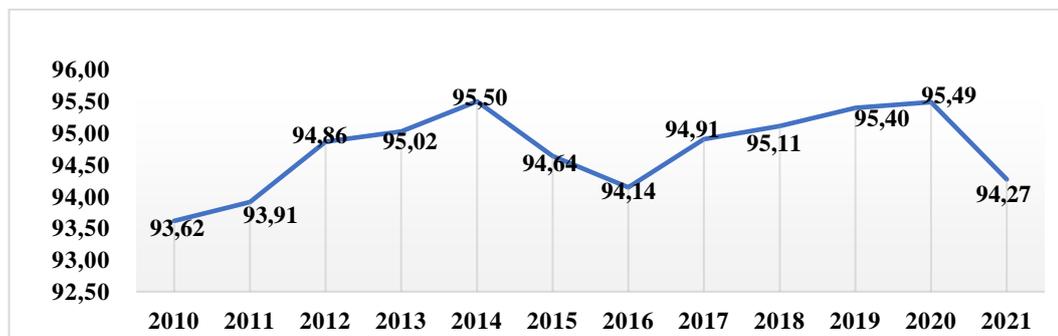
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan EPR di Pulau Sumatera selama tahun 2010-2021 mengalami peningkatan dan penurunan yang berbeda-beda setiap tahunnya, dimana bisa dilihat dari beberapa provinsi yang ada di Pulau Sumatera, terlihat bahwa EPR paling tinggi berada di Provinsi Bengkulu sebesar 97,07 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa keadaan perekonomian di Provinsi Bengkulu dapat dikatakan cukup baik sehingga dapat dilihat bahwa banyak penduduk usia produktifnya yang terserap dan bekerja di bandingkan dengan provinsi provinsi lain, walaupun dapat dilihat ada beberapa provinsi yang EPR nya berada di atas rata rata Pulau Sumatera.

Dapat dilihat bahwa lebih dari 46 persen lapangan pekerjaan utama yang digeluti oleh penduduk yang bekerja di Provinsi Bengkulu berada di sektor pertanian, sedangkan lebih dari 16 persen lainnya bergerak di bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, namun walaupun begitu penduduk yang bekerja di Provinsi Bengkulu masih di dominasi oleh mereka yang menempuh pendidikan SMA kebawah yang mencapai 78,27 persen.

Sementara provinsi dengan EPR paling rendah berada di Provinsi Aceh yang mana kondisi ini menunjukkan bahwa banyak penduduk usia produktifnya yang tidak bekerja, atau sebagian besar penduduknya masuk pada kategori bukan angkatan kerja seperti mereka yang besekolah, mengurus rumah tangga atau yang menganggur. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata rata perkembangan

EPR di 10 provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010-2021 sebesar 94,74 persen. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata rata perkembangan EPR di 10 provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010-2021 sebesar 94,74 persen (BPS Indonesia, 2022).

Gambar 5.2 Grafik perkembangan EPR tahun 2010-2021 di Pulau Sumatera



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022 (Data Diolah)

Terlihat pada grafik diatas kondisi perkembangan EPR tahun penelitian 2010-2021 menunjukkan kondisi berfluktuasi setiap tahunnya. Kondisi naik turunnya EPR bisa di pengaruhi dari tinggi rendahnya pertumbuhan angka kelahiran di provinsi di Pulau Sumatera, selain itu faktor migrasi yang dilakukan masyarakat ke Pulau Sumatera juga menjadi pemicu tingginya jumlah angkatan kerja di pulau ini, begitupun juga sebaliknya, serta banyak lapangan pekerjaan yang tersedia untuk di isi oleh angkatan kerja menjadi faktor pendorong naik turunnya EPR di Pulau Sumatera. Dapat dilihat bahwa EPR tertinggi berada di tahun 2014 sebesar 95,50 persen dan pada tahun 2020 sebesar 95,49 persen kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian pada saat itu dalam kondisi yang baik, kemudian meningkatnya jumlah angkatan kerja secara tidak langsung akan meningkatkan minat untuk bekerja dan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.

5.1.3 Perkembangan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Investasi pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi, investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara swasta dan pemerintah. Investasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk jangka panjang dapat menaikkan standar hidup masyarakatnya karena semakin banyak investasi tentunya akan berpotensi menyerap tenaga kerja lebih banyak juga (Mankiw, 2003).

Tabel 5.5 Perkembangan investasi PMDN provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010-2021 (miliar/rupiah)

Provinsi	Perkembangan Investasi PMDN (Miliar/Rupiah) tahun 2010-2021 di Pulau Sumatera												Rata-rata
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Aceh	40,9	259,4	60,2	3.636,4	5.110,3	4.192,4	2.456,1	782,8	970,0	3.606,9	8.241,1	7.904,7	3.105,1
Perkembangan %	-0,49	5,34	-0,77	59,41	0,41	-0,18	-0,41	-0,68	0,24	2,72	1,28	-0,04	5,57
Sumatera Utara	662,7	1.673,0	2.550,3	5.068,9	4.223,9	4.287,4	4.864,2	11.683,6	8.371,8	19.749,0	18.189,5	18.484,5	8.317,4
Perkembangan %	-0,68	1,52	0,52	0,99	-0,17	0,02	0,13	1,40	-0,28	1,36	-0,08	0,02	0,40
Sumatera Barat	73,8	1.026,2	885,3	677,8	421,1	1.552,5	3.795,6	1.517,0	2.309,4	3.026,6	3.106,2	4.183,7	1.881,3
Perkembangan %	-0,84	12,91	-0,14	-0,23	-0,38	2,69	1,44	-0,60	0,52	0,31	0,03	0,35	1,34
Riau	1.037,1	7.462,6	5.450,4	4.874,3	7.707,6	9.943,0	6.613,7	10.829,8	9.056,4	26.292,2	34.117,8	24.997,8	12.365,2
Perkembangan %	-0,69	6,20	-0,27	-0,11	0,58	0,29	-0,33	0,64	-0,16	1,90	0,30	-0,27	0,67
Jambi	223,3	2.134,9	1.445,7	2.799,6	908,0	3.540,2	3.884,4	3.006,6	2.876,5	4.437,4	3.511,7	6.204,2	2.914,4
Perkembangan %	0,04	8,56	-0,32	0,94	-0,68	2,90	0,10	-0,23	-0,04	0,54	-0,21	0,77	1,03
Sumatera Selatan	1.738,4	1.068,9	2.930,6	3.396,0	7.042,8	10.944,1	8.534,1	8.200,2	9.519,8	16.921,1	15.824,5	16.266,9	8.532,3
Perkembangan %	2,00	-0,39	1,74	0,16	1,07	0,55	-0,22	-0,04	0,16	0,78	-0,06	0,03	0,48
Bengkulu	8,5	41,4	52,6	109,6	7,8	553,9	949,1	296,5	4.902,8	5.458,1	5.399,2	4.923,5	1.891,9
Perkembangan %	-0,96	3,87	0,27	1,08	-0,93	70,01	0,71	-0,69	15,54	0,11	-0,01	-0,09	7,41
Lampung	272,3	824,4	304,2	1.325,3	3.495,7	1.102,3	6.031,8	7.014,8	12.314,7	2.428,9	7.120,5	10.513,2	4.395,7
Perkembangan %	-0,50	2,03	-0,63	3,36	1,64	-0,68	4,47	0,16	0,76	-0,80	1,93	0,48	1,02
Bangka-Belitung	0,4	514,4	533,5	608,2	615,5	1.023,7	2.202,0	1.734,7	3.112,9	2.915,2	1.863,8	3.677,4	1.566,8
Perkembangan %	-1,00	1.285	0,04	0,14	0,01	0,66	1,15	-0,21	0,79	-0,06	-0,36	0,97	107,26
Kepulauan Riau	166,9	1.370,4	43,5	417,7	28,5	612,1	492,5	1.398,0	4.386,0	5.656,4	14.249,0	9.768,7	3.215,8
Perkembangan %	-0,30	7,21	-0,97	8,60	-0,93	20,48	-0,20	1,84	2,14	0,29	1,52	-0,31	3,28
Rata-rata perkembangan investasi PMDN di 10 provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010-2021													12,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022 (Data Diolah)

Tabel 5.6 Rata rata perkembangan investasi di Pulau Sumatera tahun 2010-2021

Provinsi	Perkembangan%	Keterangan/Peringkat
Bangka-Belitung	107,26	1
Bengkulu	7,41	2
Aceh	5,57	3
Kepulauan Riau	3,28	4
Sumatera Barat	1,34	5
Jambi	1,03	6
Lampung	1,02	7
Riau	0,67	8
Sumatera Selatan	0,48	9
Sumatera Utara	0,40	10

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan investasi di Pulau Sumatera selama tahun 2010-2021 mengalami peningkatan dan penurunan yang berbeda-beda setiap tahunnya, dimana bisa dilihat dari beberapa provinsi yang ada di Pulau Sumatera perkembangan investasi PMDN paling tinggi berada di Provinsi Bangka Belitung sebesar 107,26 persen dimana faktor yang menyebabkan adalah iklim perekonomian dan investasi di provinsi ini cukup dinamis, dimana penanaman modal di Bangka Belitung lebih banyak berasal dari dalam negeri.

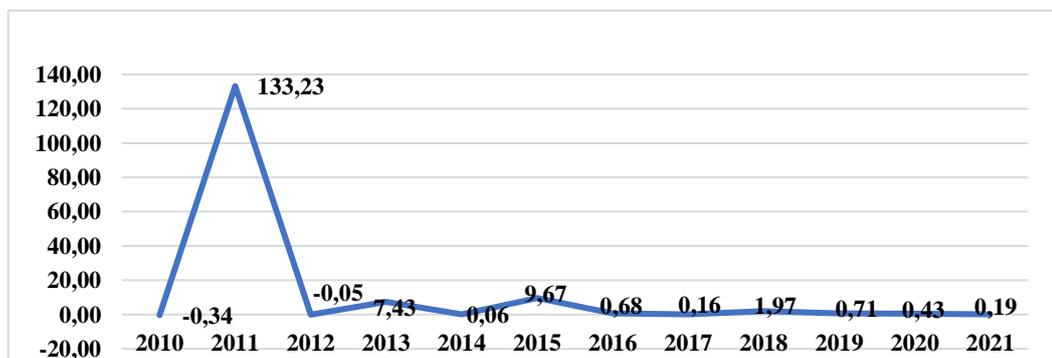
Provinsi Bangka Belitung terkenal sebagai penghasil timah terbesar di Indonesia dan sudah di akui oleh dunia, kemudian terkenal sebagai penghasil lada terbesar di Indonesia dimana salah satu komoditas perdagangan dunia lebih dari 80 persen berasal dari Bangka Belitung, tidak hanya itu Bangka Belitung merupakan wilayah kepulauan yang memiliki tempat objek wisata yang menarik seperti hamparan pantai yang indah untuk di kunjungi khususnya bagi wisatawan asing selain itu Bangka Belitung juga terkenal sebagai penghasil olahan terasi yang sudah di ekspor ke luar negeri (Badan Pusat Statistik, 2022)

Sementara dapat dilihat bahwa investasi paling rendah ada di Provinsi Sumatera Utara hal ini bisa disebabkan salah satunya sulitnya perizinan dalam melakukan investasi hal ini ditandai dengan investor yang akan masuk masih ada yang dipersulit untuk berusaha, (kepercayaan investormasih belum diberi

kepastian), masih sulitnya mengeksekusi realisasi investasi besar hal ini dibuktikan dengan insentif fiskal belum seluruhnya diberikan kepada investor, BKPM belum mendorong seutuhnya investasi besar untuk bermitra dengan pengusaha-pengusaha daerah, kemudian infrastruktur listrik, jalan dan transportasi yang menjadi salah satu pertimbangan para investor dalam menanamkan modalnya di daerah ini. Tidak hanya itu pertumbuhan ekonomi yang cenderung tidak stabil serta laju inflasi yang tidak stabil menjadi salah satu pertimbangan bagi para investor (BKPM, 2022).

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata rata perkembangan investasi PMDN di 10 provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010-2021 sebesar 12,85 persen.

Gambar 5.3 Grafik perkembangan investasi PMDN tahun 2010-2021 di Pulau Sumatera



Sumber :Badan Pusat Statistik, 2022 (Data Diolah)

Dapat dilihat dari grafik di atas kondisi perkembangan investasi PMDN di Pulau Sumatera dari tahun 2010-2021 cenderung menunjukkan kondisi berfluktuasi setiap tahunnya, dimana dapat dilihat investasi PMDN paling tinggi berada pada tahun 2011 yang mana kondisi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 terus menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya hal ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat juga mengalami peningkatan yang mana meningkatnya pendapatan masyarakat menjadi faktor penting yang mempengaruhi investasi yang ditanamkan, karena semakin besar pendapatan masyarakat maka konsumsi akan barang dan jasa juga meningkat.

Kemudian pada tahun tersebut infrastruktur di beberapa provinsi mulai di benahi dan dibangun hal ini juga menjadi pertimbangan untuk investor menanamkan modalnya, terlihat investasi di Bangka Belitung tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup tinggi hal ini di dorong sektor pariwisata

dimana pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar mengingat Bangka Belitung merupakan provinsi kepulauan yang memiliki banyak pantai dan pulau-pulau kecil sehingga menarik wisatawan asing untuk datang, didukung dengan hasil laut dan sumber daya energinya yang melimpah (Badan Pusat Statistik, 2022)

Tidak hanya itu faktor lain yang membuat investasi di provinsi provinsi di Pulau Sumatera meningkat yaitu melimpahnya sumber daya alam khususnya sumber daya energi yang cukup menarik minat para investor.

5.1.4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan rata-rata dari output yang dihasilkan setiap orang dalam produksi barang dan jasa yang merupakan tingkat pertumbuhan perkapita secara riil bagi setiap orang.

Pertumbuhan ekonomi dibutuhkan dan merupakan sumber utama peningkatan standar hidup (*standard of living*) penduduk yang jumlahnya terus meningkat. Dengan kata lain, kemampuan ekonomi suatu negara untuk meningkatkan standar hidup penduduknya sangat bergantung dan ditentukan oleh laju pertumbuhan ekonomi jangka panjangnya *long run rate of economic growth* (Nanga, 2007).

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan antara sektor-sektor ekonomi sehingga dengan terciptanya pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan dan pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam suatu proses pembangunan ekonomi mencakup aktifitas ekonomi yang mengupayakan pengoptimalan penggunaan faktor-faktor ekonomi yang tersedia sehingga menciptakan nilai ekonomis, salah satu faktor ekonomi yang dimaksud adalah tenaga kerja.

Pembangunan ekonomi sangat diperlukan untuk memperkecil tingkat pengangguran, dengan pembangunan ekonomi diharapkan laju pertumbuhan ekonomi dapat selalu dipertahankan pada tingkat yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk, sehingga kegiatan perekonomian akan menjadi lebih luas dan selanjutnya dapat memperkecil jumlah pengangguran (Sukirno,1996)

Tabel 5.7 Perkembangan pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010-2021 (persen)

Provinsi	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (%) tahun 2010-2021 di Pulau Sumatera												Rata- rata
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Aceh	2,74	3,28	3,85	2,61	1,55	-0,73	3,29	4,18	4,61	4,14	-0,37	2,79	2,66
Sumatera Utara	6,42	6,66	6,45	6,07	5,23	5,1	5,18	5,12	5,18	5,22	-1,07	2,61	4,85
Sumatera Barat	5,94	6,34	6,31	6,08	5,88	5,53	5,27	5,3	5,14	5,01	-1,61	3,29	4,87
Riau	4,21	5,57	3,76	2,48	2,71	0,22	2,18	2,66	2,35	2,81	-1,13	3,36	2,60
Jambi	7,35	7,86	7,03	6,84	7,36	4,21	4,37	4,6	4,69	4,35	-0,51	3,69	5,15
Sumatera Selatan	5,63	6,36	6,83	5,31	4,79	4,42	5,04	5,51	6,01	5,69	-0,11	3,58	4,92
Bengkulu	6,1	6,46	6,83	6,07	5,48	5,13	5,28	4,98	4,97	4,94	-0,02	3,27	4,96
Lampung	5,88	6,56	6,44	5,77	5,08	5,13	5,14	5,16	5,23	5,26	-1,66	2,77	4,73
Bangka-Belitung	5,99	6,9	5,5	5,2	4,67	4,08	4,1	4,47	4,45	3,32	-2,29	5,05	4,29
Kepulauan Riau	6,07	6,96	7,63	7,21	6,6	6,02	4,98	1,98	4,47	4,83	-3,8	3,43	4,70
Rata-rata perkembangan pertumbuhan ekonomi di 10 provinsi di Pulau Sumatera													4,37

Sumber; Badan Pusat Statistik Indonesia,2022 (Data Diolah)

Tabel 5.8 Rata-rata perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera tahun 2010-2021

Provinsi	Perkembangan %	Keterangan/Peringkat
Jambi	5,15	1
Bengkulu	4,96	2
Sumatera Selatan	4,92	3
Sumatera Barat	4,87	4
Sumatera Utara	4,85	5
Lampung	4,73	6
Kepulauan Riau	4,70	7
Bangka-Belitung	4,29	8
Aceh	2,66	9
Riau	2,60	10

Sumber :Badan Pusat Statistik,2022 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera selama tahun 2010-2021 mengalami peningkatan dan penurunan yang berbeda-beda setiap tahunnya, dimana bisa dilihat dari beberapa provinsi yang ada di Pulau Sumatera rata rata perkembangan pertumbuhan ekonomi paling tinggi berada di Provinsi Jambi sebesar 5,15 persen. Salah satu penyebabnya adalah perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan di ikuti oleh pertambangan penggalian perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan industri pengolahan. Peranan dari lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Jambi sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,

Selain itu ekspor komoditi pertanian seperti sawit dan karet beserta hasil olahan turunanya, dan pertambangan sebagai sumber ekonomi primer menyumbang sebagian besar kinerja ekspor yang memberikan dampak positif kepada penerimaan masyarakat Jambi dan didorong dengan terjaganya harga global. Selain itu peningkatan kinerja pertanian terutama didorong oleh peningkatan produktivitas subsektor perkebunan dan permintaan komoditas perkebunan, sementara itu kinerja pertambangan dan penggalian ditopang oleh peningkatan permintaan komoditas energi primer di pasar global dan domestik di tengah penguatan harga komoditas. Tidak hanya itu sektor perdagangan turut mengalami peningkatan yang disebabkan oleh mulai kembali normalnya konsumsi masyarakat serta perkembangan laju inflasi Provinsi Jambi yang meningkat seiring

dengan pemulihan perekonomian yang terus berlangsung namun tetap terjaga pada kisaran sasaran inflasi.

Sementara dapat dilihat provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi paling rendah berada di Provinsi Riau salah satu penyebabnya adalah karna tidak meratanya pembangunan di daerah ini sehingga menyebabkan masih banyak terjadi ketimpangan mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan lain sebagainya. Selain itu melambatnya pertumbuhan ekonomi di daerah ini salah satunya di sebabkan oleh melambatnya kinerja empat sektor utama provinsi ini yaitu sektor pertanian, sektor industri, sektor konstruksi, dan sektor pertambangan. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata rata perkembangan pertumbuhan ekonomi di 10 provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010-2021 sebesar 4,37 persen (Badan Pusat Statistik,2022).

Gambar 5.4 Grafik perkembangan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2010-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik,2022 (Data Diolah)

Dapat dilihat dari grafik di atas kondisi perkembangan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera cenderung menunjukkan kondisi berfluktuasi setiap tahunnya, dimana dapat dilihat pertumbuhan ekonomi paling tinggi berada pada tahun 2011 yang mana salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera yaitu banyaknya jumlah penduduk di Pulau ini, semakin tinggi pendapatan masyarakatnya akan menyebabkan semakin tinggi konsumsi barang dan jasa yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, selain itu kekayaan alam yang di miliki Pulau Sumatera seperti sumber daya pertambangan dan hasil pertanian karet dan kelapa sawit yang menjadi komoditi unggulan juga merupakan salah satu pendukung meningkatnya pertumbuhan ekonomi serta kemajuan penggunaan teknologi dalam memproduksi suatu barang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Kemudian dapat dilihat pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 1,26 persen hal ini bisa disebabkan oleh pandemi yang terjadi pada tahun 2020 yang secara langsung mempengaruhi penurunan pertumbuhan ekonomi di mana kebijakan lockdown yang dilakukan pada saat itu berdampak terhadap akses ekspor maupun impor komoditi unggulan di pulau ini seperti karet dan kelapa sawit, serta banyaknya perusahaan yang memutuskan untuk mengurangi produksi atau bahkan tutup serta kebijakan yang mengharuskan bekerja dirumah ini juga berpengaruh terhadap menurunnya pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhi penurunan pertumbuhan ekonomi di pulau ini.

5.1.5 Perkembangan Inflasi

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang dijumpai di hampir semua negara di dunia adalah inflasi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan definisi dari inflasi memiliki pandangan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya mereka memiliki konsep yang sama. (Boediono,1985).

Inflasi didefinisikan sebagai sebuah kondisi dimana harga produk secara berkepanjangan mengalami peningkatan dalam periode waktu tertentu. Oleh karena itu, beberapa ciri yang berkaitan dengan inflasi harus diketahui seperti: (1) Inflasi adalah keadaan dimana harga produk dan jasa mengalami kenaikan secara konstan. (2) kenaikan yang terjadi tidak harus dengan persentase yang sama namun harga barang tersebut harus terus meningkat selama waktu tertentu bisa hitungan bulan atau tahun. (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, 2014).

Menurut teori permintaan, ketika permintaan agregat meningkat maka harga akan naik, dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (asumsinya tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi), pengangguran akan berkurang karena permintaan akan tenaga kerja meningkat (Arsyad,2004)

Tabel 5.9 Perkembangan inflasi di 10 provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010-2021 (persen)

Provinsi	Perkembangan Inflasi (Persen) tahun 2010-2021 di Pulau Sumatera												Rata-rata
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Aceh	4,64	3,54	0,06	6,39	7,83	1,27	3,13	4,86	1,93	1,38	3,46	2,41	3,41
Sumatera Utara	7,65	3,54	3,79	10,09	8,24	3,32	6,6	3,18	1	2,43	1,76	1,7	4,44
Sumatera Barat	7,84	5,37	4,16	10,87	11,9	0,85	5,02	2,11	2,78	1,72	2,12	1,37	4,68
Riau	7	5,09	3,35	8,83	8,53	2,71	4,19	4,07	2,54	2,56	2,24	1,55	4,39
Jambi	10,52	2,76	4,22	8,74	8,72	1,37	4,54	2,68	3,02	1,27	3,09	1,67	4,38
Sumatera Selatan	6,02	3,78	2,72	7,04	8,38	3,05	3,68	2,85	2,78	2,06	1,5	1,84	3,81
Bengkulu	9,08	3,96	4,61	9,94	10,85	3,25	5	3,56	2,35	2,91	0,89	2,42	4,90
Lampung	9,95	4,24	4,3	7,56	8,36	4,65	2,75	3,14	2,92	3,53	1,93	2,13	4,62
Bangka-Belitung	9,36	5	6,57	8,71	6,81	4,66	7,78	2,66	3,45	2,31	0,52	3,6	5,12
Kepulauan Riau	6,17	3,32	3,92	10,09	7,49	2,46	3,06	3,37	2,36	2,4	1,66	0,86	3,93
Rata -rata perkembangan inflasi di 10 provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010 -2021													4,37

Sumber:Badan Pusat Statistik Indonesia,2022 (Data Diolah)

Tabel 5.10 Rata-rata perkembangan inflasi di Pulau Sumatera tahun 2010-2021

Provinsi	Perkembangan %	Keterangan/Peringkat
Bangka-Belitung	5,12	1
Bengkulu	4,90	2
Sumatera Barat	4,68	3
Lampung	4,62	4
Sumatera Utara	4,44	5
Riau	4,39	6
Jambi	4,38	7
Kepulauan Riau	3,93	8
Sumatera Selatan	3,81	9
Aceh	3,41	10

Sumber: Badan Pusat Statistik,2022 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan inflasi di Pulau Sumatera selama tahun 2010-2021 mengalami peningkatan dan penurunan yang berbeda-beda setiap tahunnya. Dapat dilihat bahwa perkembangan rata rata inflasi dari beberapa provinsi di Pulau Sumatera paling tinggi berada di Provinsi Bangka Belitung, dimana inflasi Bangka Belitung lebih besar dibandingkan rata rata inflasi di Pulau Sumatera yang mencapai 5,12 persen, hal ini disebabkan karena peredaran uang di Bangka Belitung relatif banyak, salah satu faktor yang mempengaruhinya adanya tambang timah, perkebunan sawit, dan aktivitas ekonomi lainnya yang menyebabkan inflasi tinggi (Badan Pusat Statistik,2022)

Selain itu dilihat secara geografis Bangka Belitung merupakan daerah berbentuk kepulauan sehingga sangat sulit diakses melalui perairan apabila memasuki musim penghujan yang tinggi, serta kondisi ketergantungan terhadap kebutuhan barang yang tinggi juga menyebabkan Provinsi Bangka Belitung terkena dampak apabila di wilayah pemasok terjadi gejolak harga. Tidak hanya itu beberapa tahun terakhir Bangka Belitung sedang melakukan peningkatan pada beberapa indeks pengeluaran seperti kelompok makanan, minuman, peralatan dan pemeliharaan, perumahan dan lain sebagainya, hal inilah yang menyebabkan inflasi di provinsi ini tinggi.

Sementara itu provinsi dengan tingkat inflasi paling rendah berada di Provinsi Aceh sebesar 3,41 persen salah satu faktor yang menyebabkan adalah tersedianya dan tercukupi pasokan pangan yang menyebabkan pasokan permintaan dan

penawaran khususnya bahan pangan relatif seimbang sehingga harga cenderung stabil, salah satu penyebab kestabilan harga yaitu seringnya dilakukan inspeksi ke pasar pasar, gudang dan di gelarnya pasar murah oleh pemerintah disejumlah lokasi, selain itu sering dilakukan edukasi oleh Bank Indonesia terkait edukasi untuk tidak berbelanja secara berlebihan serta pencapaian inflasi rendah di aceh tidak terlepas dari peran dan upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh dalam melakukan koordinasi untuk menekan gejala inflasi di Provinsi Aceh yang sejalan dengan strategi 4K, yaitu: menjamin ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi. (Bank Indonesia, 2022).

Gambar 5.5 Grafik perkembangan inflasi tahun 2010-2021 di Pulau Sumatera



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (Data Diolah)

Dapat dilihat dari grafik diatas perkembangan inflasi setiap tahunnya menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Berdasarkan besarnya inflasi yang terjadi dari tahun 2010-2021 cenderung menunjukkan angka beragam setiap tahunnya dan dapat dilihat bahwa inflasi yang terjadi secara umum masih tergolong jenis inflasi yang ringan dimana besarnya menunjukkan angka kurang dari 10 persen. tentunya hal ini yang perlu di perhatikan karena jika inflasi yang terjadi sudah terlalu tinggi maka ini akan berpotensi menyebabkan kondisi pengangguran namun jika inflasi yang terjadi masih dalam kondisi yang ringan maka ini berpotensi untuk menyerap tenaga kerja.

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya inflasi di Pulau Sumatera terutama pada tahun 2013 dan 2014 yaitu, adanya kenaikan harga bahan pokok atau

terjadinya kelangkaan sebuah komoditi atau produk yang terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama. Hal ini bisa di sebabkan karena kenaikan biaya produksi seperti BBM, atau kenaikan upah yang menyebabkan pembengkakan biaya produksi yang pada akhirnya akan mendorong para produsen untuk meningkatkan harga produk yang di jual di pasar, selain itu juga karena adanya kenaikan permintaan terhadap suatu barang yang terjadi dalam waktu yang lama dan berpotensi menyebabkan inflasi.

5.2 Pengaruh EPR (Employment to Population Ratio), Investasi PMDN, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 10 provinsi di Pulau Sumatera.

Pada bagian ini akan menjawab rumusan masalah kedua terkait bagaimana pengaruh dari EPR, investasi PMDN, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan menggunakan perhitungan regresi data panel dengan menggunakan gabungan data time series dan cross section, dimana time series yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2010-2021 dan cross section objeknya yaitu meliputi 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera, dimana variabel independen yang di gunakan dalam penelitian ini adalah EPR (Employment to Population Ratio) investasi PMDN, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi sementara variabel dependennya adalah penyerapan tenaga kerja

5.2.1 Pemilihan Model Pengujian Data Panel Terbaik

Dalam alat analisis data panel terdapat tiga uji yang dilakukan yaitu uji chow, uji hausman, dan uji langrange multiplier

Tabel 5.11 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FEM
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1413.967482	(9,106)	0.0000
Cross-section Chi-square	575.548251	9	0.0000

Sumber: Data Diolah, Eviews 12 (2023)

Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian Uji Chow ini adalah:

- a) Jika $p\text{-value} < \alpha$, maka H_0 , ditolak dan H_1 , diterima, artinya model FEM lebih baik dibandingkan model CEM
- b) Jika $p\text{-value} > \alpha$, maka H_1 , ditolak dan H_0 diterima. artinya model CEM lebih baik dibandingkan model FEM.

Berdasarkan output Eviews tersebut menunjukkan bahwa baik F test maupun Chi-Square signifikan Prob. 0,0000 dan 0,0000 lebih kecil dibandingkan alfa 0,05 persen), sehingga model ini hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model FEM lebih baik dibandingkan model CEM. Sehingga pengujian berikutnya yaitu dengan membandingkan metode FEM atau REM dengan melakukan uji hasuman

Tabel 5.12 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: REM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.357055	4	0.6704

Sumber: Data Diolah, Eviews 12 (2023)

Adapun hipotesis yang digunakan dalam pemilihan Uji Hausman ini adalah:

- a. Jika $p\text{-value} < \alpha$, maka H_0 , ditolak dan H_1 diterima, artinya model FEM lebih baik dibandingkan model REM
- b. Jika $p\text{-value} > \alpha$, maka H_1 , ditolak dan H_0 diterima, artinya model REM lebih baik dibandingkan model FEM

Berdasarkan output Eviews tersebut menunjukkan bahwa nilai statistic Chi- Square memiliki Prob lebih besar dibanding alfa 0,05 persen ($0,6704 > 0,05$). Sehingga hipotesis H_1 ditolak dan H_0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model REM lebih baik dibandingkan FEM. Selanjutnya pengujian Uji Lagrange Multiplier untuk menentukan metode yang terbaik antara CEM dan REM.

Tabel 5.13 Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	545.1055 (0.0000)	5.055933 (0.0245)	550.1614 (0.0000)

Sumber: Data Diolah, Eviews 12 (2023)

Adapun hipotesis yang digunakan dalam pemilihan Uji Lagrange Multiplier ini adalah

- Jika $p\text{-value} < \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya model REM lebih baik dibandingkan model CEM
- Jika $p\text{-value} > \alpha$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya model CEM lebih baik dibandingkan model REM

Dari hasil output di atas dapat dilihat bahwa nilai Prob. Breusch-Pagan (BP) sebesar 0.000 (pada kolom ketiga yaitu "Both"). Sesuai hipotesis, jika Prob BP (0.000) < 0.05 maka H_1 diterima, dengan kata lain model yang cocok adalah *Random Effect Model* (REM)

5.2.2 Hasil Estimasi Model Terpilih Regresi Data Panel dengan Metode REM

Berdasarkan hasil Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier model yang sering muncul adalah model REM sehingga penelitian ini akan menggunakan model Random Effect Model (REM) sebagai model dalam penelitian ini.

Tabel 5.14 Hasil Estimasi Random Effect Model (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4872141.	1646831.	-2.958495	0.0038
EPR	78697.23	16087.89	4.891707	0.0000
PMDN	24.95490	3.782160	6.598055	0.0000
PE	-9792.162	8199.925	-1.194177	0.2349
INF	-24736.25	6126.215	-4.037770	0.0001

Sumber: Data Diolah, Eviews 12 (2023)

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 5.9 tersebut dapat diketahui penjelasan masing masing variabel dalam penelitian ini yaitu EPR (Employment to Population Ratio), investasi PMDN, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera dapat di jelaskan persamaan model sebagai berikut:

$$PTK_{it} = \beta_0 + \beta_1 EPR_{it} + \beta_2 PMDN_{it} + \beta_3 PE_{it} + \beta_4 INF_{it} + e_{it}$$

$$PTK_{it} = -4872141 + 78697.23 EPR_{it} + 24.95490 PMDN_{it} - 9792.162 PE_{it} - 24736.25 INF_{it}$$

$$\text{Prob} = (0.0038) \quad (0.0000) \quad (0.0000) \quad (0.2349) \quad (0.0001)$$

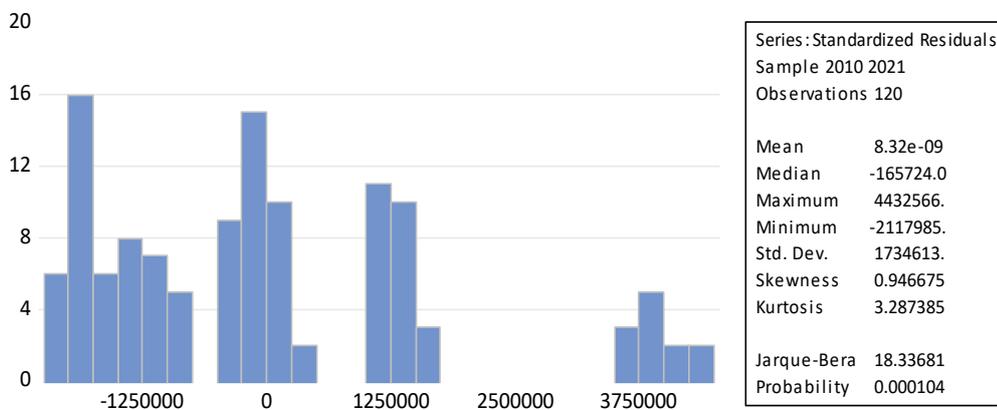
Berdasarkan persamaan model diatas dapat dijelaskan hasil estimasi terhadap *Random Effect Model* sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar -4872141 apabila EPR, Investasi PMDN, PE dan INF tetap maka rata-rata penyerapan tenaga kerja di provinsi di Pulau Sumatera mengalami penurunan sebesar 4.872.141 jiwa
2. Nilai koefisien regresi data panel EPR (Employment to Population Ratio) sebesar 78697.23 dengan asumsi variabel tetap atau konstan maka dapat diartikan ketika EPR meningkat 1 persen maka penyerapan tenaga kerja di provinsi di Pulau Sumatera ikut meningkat sebesar 78.697 jiwa. Hal ini sejalan dengan hipotesis awal yang mana diduga bahwa EPR memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.
3. Nilai koefisien regresi data panel investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) sebesar 24.95490 dengan asumsi variabel tetap atau konstan maka dapat diartikan ketika investasi PMDN meningkat Rp.1 Miliar maka penyerapan tenaga kerja di provinsi di Pulau Sumatera ikut meningkat sebesar 24.954 jiwa. Hal ini sejalan dengan hipotesis awal yang mana diduga bahwa investasi PMDN memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

4. Nilai koefisien regresi data panel PE (Pertumbuhan Ekonomi) sebesar - 9792.162 dengan asumsi variabel tetap atau konstan maka dapat diartikan ketika PE meningkat 1 persen maka penyerapan tenaga kerja di provinsi di Pulau Sumatera mengalami penurunan sebesar 9.792 jiwa. Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis awal yang mana diduga bahwa PE memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.
5. Nilai koefisien regresi data panel INF (Inflasi) sebesar -24736.25 dengan asumsi variabel tetap atau konstan maka dapat diartikan ketika INF meningkat 1 persen maka penyerapan tenaga kerja di provinsi di Pulau Sumatera ikut menurun sebesar 24.736 jiwa. Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis awal yang mana diduga bahwa INF memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

5.3 Uji Asumsi Klasik

Gambar 5.6 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data diolah, Eviews 12 (2023)

Kriteria penilaian jika tingkat probabilitinya $>$ dari 0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal dan sebaliknya jika probabilitinya $<$ 0,05 maka data tidak normal. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa probabiliti dari uji normalitas adalah 0.000104 yang artinya lebih kecil dari tingkat $\alpha = 5$ persen yaitu (0.000104 $<$ 0,05) artinya data tidak berdistribusi normal

Tabel 5.15 Hasil Uji Multikolonieritas

	EPR	PMDN	PE	INF
EPR	1.000000	0.020066	0.056055	0.077771
PMDN	0.020066	1.000000	-0.456962	-0.380734
PE	0.056055	-0.456962	1.000000	0.405839
INF	0.077771	-0.380734	0.405839	1.000000

Sumber: Data diolah, Eviews 12 (2023)

Kriteria untuk penilainya jika $< 0,8$, maka data terbebas dari masalah multikolonieritas, akan tetapi jika $> 0,8$ maka data terjangkit masalah multikolinieritas. Berdasarkan tabel 5.10 nilai korelasi antara EPR terhadap PMDN, PE dan INF kecil dari 0,8 kemudian korelasi antara PMDN terhadap EPR, PE dan INF kecil dari 0,8 korelasi antara PE terhadap EPR, PMDN dan INF kecil dari 0,8 dan korelasi antara INF terhadap EPR, PMDN, dan PE kecil dari 0,8. Dapat disimpulkan bahwa variabel independent terbebas dari masalah multikolonieritas.

Tabel 5.16 Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID)
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 03/30/23 Time: 20:39
 Sample: 2010 2021
 Periods included: 12
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 120
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2336977.	1284281.	-1.819676	0.0714
EPR	394.8170	129.4830	3.049180	0.0028
PMDN	3.899649	3.045064	1.280646	0.2029
PE	-10114.62	6602.667	-1.531900	0.1283
INF	-9045.260	4932.997	-1.833624	0.0693

Sumber: Data diolah, Eviews 12 (2023)

Kriteria penilaian heteroskedastisitas dengan uji glejser adalah jika nilai prob $> 0,05$ maka data dikatakan tidak terkena gejala heteroskedastisitas. Terlihat bahwa dari keempat variabel independen variabel EPR menunjukkan prob. $< 0,05$ maka variabel EPR terjangkit masalah heteroskedastisitas.

5.4 Uji Statistik

Tabel 5.17 Uji Statistik t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4872141.	1646831.	-2.958495	0.0038
EPR	78697.23	16087.89	4.891707	0.0000
PMDN	24.95490	3.782160	6.598055	0.0000
PE	-9792.162	8199.925	-1.194177	0.2349
INF	-24736.25	6126.215	-4.037770	0.0001

Sumber: Data Diolah, Eviews 12 (2023)

Uji statistik t dilakukan untuk membuktikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu

Berdasarkan hasil regresi data panel dengan metode *random effect model* diketahui bahwa:

1. Di ketahui bahwa nilai t-statistik variabel EPR (Employment to Population Ratio) yaitu sebesar 4.891707 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 dimana ini lebih kecil dari tingkat $\alpha = 5$ persen ($0.0000 < 0,05$) maka H_0 di tolak dan H_1 di terima. Artinya EPR berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera.
2. Di ketahui bahwa nilai t-statistik variabel investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yaitu sebesar 6.598055 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 dimana ini lebih kecil dari tingkat $\alpha = 5$ persen ($0.0000 < 0,05$) maka H_0 di tolak dan H_1 di terima. Artinya variabel PMDN berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera
3. Di ketahui bahwa nilai t-statistik variabel PE pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar -1.194177 dengan nilai probabilitas sebesar 0.2349 dimana ini lebih besar dari tingkat $\alpha = 5$ persen ($0.2349 > 0,05$) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya variabel PE tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera.
4. Di ketahui bahwa nilai t-statistik variabel INF inflasi yaitu sebesar -4.037770 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0001 dimana ini lebih kecil dari tingkat $\alpha = 5$ persen ($0.0001 < 0,05$) maka H_0 di tolak dan H_1 di terima artinya variabel

INF berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera.

Tabel 5.18 Uji Statistik F

R-squared	0.636392	Mean dependent var	57634.39
Adjusted R-squared	0.623744	S.D. dependent var	253997.7
S.E. of regression	155801.4	Sum squared resid	2.79E+12
F-statistic	50.31856	Durbin-Watson stat	1.066826
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data Diolah, Eviews 12 (2023)

Berdasarkan hasil *regresi random effect model* diatas, dapat di lihat bahwa F-statistik sebesar 50.31856 dengan probabilitas F-statistik sebesar (0.000000) atau lebih kecil dari tingkat $\alpha = 5$ persen ($0.000000 < 0,05$). Artinya terdapat pengaruh signifikan antara EPR, investasi PMDN, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi di Pulau Sumatera.

5.5 Koefisien Determinasi R^2

Berdasarkan hasil regresi metode *random effect model*, di peroleh nilai koefisien determinasi sebesar 0.636392. Artinya variasi perubahan (naik /turunya) variabel penyerapan tenaga kerja selama periode penelitian 2010 - 2021 mampu di jelaskan dengan baik oleh variabel EPR, investasi PMDN, pertumbuhan ekonomi dan inflasi sebesar 63,6392 persen. Sedangkan sisanya sebesar 36,3608 persen di jelaskan variabel lain yang tidak di gunakan dalam penelitian ini.

5.6 Analisis Ekonomi

Dari hasil regresi data panel *random effect model* variabel EPR mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 78697.23. Artinya EPR (Employment to Population Ratio) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan EPR sebesar 1 persen akan menyebabkan peningkatan terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 78.697 jiwa dengan asumsi variabel lain tetap/konstan. Selain itu hasil olahan data juga di peroleh nilai probabilitas variabel EPR (*Employment to Population Ratio*) adalah $0.0000 < 0,05$ maka variabel EPR berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga

kerja. Maka dapat disimpulkan bahwa EPR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wiasih (2021) yang menyatakan bahwa angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Tidak hanya itu asumsi ini juga diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2019) diperoleh hasil bahwa variabel angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada seluruh provinsi di Indonesia. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja maka akan di ikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja, hal ini karena jumlah angkatan kerja selama periode penelitian cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana banyaknya angkatan kerja yang bekerja menunjukkan kondisi banyaknya pasokan lapangan kerja yang tersedia.

Semakin meningkat total produksi suatu negara menunjukkan semakin besar lapangan kerja yang tersedia, dimana faktor untuk melihat kemajuan ketenagakerjaan di Indonesia adalah banyaknya populasi angkatan kerja yang tersedia, semakin banyak jumlah angkatan kerja yang tersedia artinya jumlah penawaran tenaga kerja yang ingin bekerja dan tersedia semakin banyak, kondisi ini akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Selain itu semakin tinggi rasio EPR suatu provinsi menunjukkan semakin banyak jumlah angkatan kerja yang terserap dan bekerja, dan ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan lapangan kerja di provinsi tersebut cukup banyak sehingga mampu menyerap banyak angkatan kerja.

Peluang kerja dapat tercipta jika masyarakat memiliki ketrampilan atau keahlian yang cukup baik, karena setiap perusahaan tentunya ingin mendapat keuntungan maksimum dengan memaksimalkan segala faktor produksi yang ada. Dalam hal ini tentunya perusahaan akan memilih tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi, produktivitas tenaga kerja tentunya dapat dilihat dari ketrampilan atau keahlian yang dimiliki tenaga kerja, sedangkan untuk mendapatkan ketrampilan dan keahlian dapat dilakukan melalui jalur pendidikan, maupun kegiatan pelatihan dengan begitu maka semakin tinggi angka tingkat

pendidikan dan ketrampilan maka peluang untuk terserap dalam lapangan kerja juga akan semakin besar.

Bisa dilihat bahwa Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau yang memiliki sumber daya alam yang melimpah khususnya sumber daya pertambangan, dan juga terkenal dengan hasil perkebunan sawit dan karetinya serta objek wisata yang sangat terkenal indah. Itulah salah satu yang menyebabkan beberapa provinsi di Pulau Sumatera memiliki rasio EPR yang tinggi.

Dari hasil regresi data panel *random effect model* variabel investasi PMDN mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 24.95490. Artinya investasi PMDN berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan investasi PMDN sebesar Rp.1 miliar akan menyebabkan peningkatan terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 24.954 jiwa dengan asumsi variabel lain tetap/konstan. Selain itu hasil olahan data juga di peroleh nilai probabilitas variabel investasi PMDN adalah $0.0000 < 0,05$ maka variabel investasi PMDN berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Maka dapat disimpulkan bahwa investasi PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Purba (2020) yang menyatakan bahwa investasi PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi provinsi di Pulau Sumatera. Salah satu faktor yang mendukung adalah Pulau Sumatera merupakan pulau yang sangat kaya akan sumber daya alam terkhususnya sumber daya energi pertambangan yang mana semakin banyak investasi dalam negeri yang di tanamkan maka akan semakin berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dalam perencanaan penyerapan tenaga kerja, melalui penambahan modal dalam setiap aktifitas pembangunan akan memberikan dampak positif terhadap pengembangan penyediaan lapangan kerja secara total. Perubahan atau peningkatan investasi tentunya akan diikuti atau diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja. Maka dari itu untuk meningkatkan investasi pada suatu daerah maka usaha yang dapat di lakukan pemerintah adalah memberikan peluang dan membuka sebesar-sebesarnya akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan potensi SDA yang dimiliki

masing-masing daerah. Dengan begitu diharapkan investasi dapat memberikan peluang atau kesempatan dalam menyerap tenaga kerja.

Dari hasil regresi data panel *random effect model* variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai koefisien regresi sebesar -9792.162. Artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja, hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan menyebabkan penurunan terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 9.792 jiwa dengan asumsi variabel lain tetap/konstan. Selain itu hasil olahan data juga di peroleh nilai probabilitas variabel pertumbuhan ekonomi adalah $0.2349 > 0,05$ maka variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Wiasih (2021) yang menyatakan secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera karena, kondisi pertumbuhan ekonomi yang cenderung tidak stabil setiap tahunnya dimana pada tahun 2020 hampir di semua provinsi terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang salah satu penyebabnya adalah pandemi covid 19 yang mengguncang perekonomian dunia yang tentunya berpengaruh terhadap kondisi ekonomi sehingga berpengaruh terhadap berkurangnya penyerapan tenaga kerja selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada dasarnya akan menyebabkan segala pekerjaan di gantikan dengan tenaga mesin, dimana penggunaan teknologi juga berpengaruh menurunkan penyerapan tenaga kerja karena banyak perusahaan lebih memilih menggunakan teknologi mesin dibandingkan tenaga manusia karena tentunya penggunaan teknologi mesin akan lebih efisien dalam waktu serta biaya produksi yang lebih murah.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu sarana utama bagi pembangunan manusia untuk dapat berlangsung secara berkesinambungan dalam hal ini ketenagakerjaan menjadi jembatan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia dan menjadi pilar penting dalam pembangunan.

Dari hasil regresi data panel *random effect model* variabel inflasi mempunyai nilai koefisien regresi sebesar -24736.25. Artinya inflasi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja, hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan inflasi sebesar 1 persen akan menyebabkan penurunan terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 24.736 jiwa dengan asumsi variabel lain tetap/konstan. Selain itu hasil olahan data juga di peroleh nilai probabilitas variabel inflasi adalah $0.0001 < 0,05$ maka variabel inflasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, maka dapat disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Inflasi berhubungan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja karena pada dasarnya semakin tinggi inflasi maka akan semakin berkurang penyerapan tenaga kerja, dimana pada saat terjadi inflasi yang tinggi biasanya para investor berpikir ulang untuk menanamkan modalnya, karena para investor berpikir akan mengalami kerugian yang disebabkan tingginya modal yang dikeluarkan dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan dan pada akhirnya perusahaan akan mengurangi penggunaan tenaga kerja yang ada.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indradewa (2015) yang menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Salah satu faktor yang menyebabkan turunya penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera yaitu naiknya angka inflasi, dan terlihat bahwa inflasi yang terjadi setiap tahunnya cenderung tidak stabil dan di beberapa tahun berada di angka yang cukup tinggi dan cenderung terjadi pada barang barang konsumsi sehingga hal ini membuat produsen kesulitan dalam membeli bahan baku untuk produksi dan memilih untuk mengurangi jumlah produksi sehingga berpotensi menurunkan penyerapan tenaga kerja.

Pada dasarnya inflasi merupakan salah satu variabel yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Inflasi dalam perekonomian disatu sisi selalu menjadi hal yang relatif menakutkan, karena inflasi dapat melemahkan daya beli dan dapat melumpuhkan kemampuan produksi yang mengarah pada krisis produksi dan konsumsi. Oleh karena itu pemerintah dapat memperluas kerja sama antar

daerah, terutama untuk daerah surplus atau defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas.

5.3 Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan pada penelitian ini, maka dibutuhkan suatu kebijakan untuk dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sumatera.

Berikut kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat diberikan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan EPR melalui Program Kartu Prakerja yang diberikan kepada masyarakat, dimana ini adalah program pengembangan kompetensi kerja yang diberikan pemerintah yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Tidak hanya itu pemerintah juga dapat memberikan pelatihan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada di Pulau Sumatera dan juga mendorong jiwa kewirausahaan sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan memulihkan perekonomian, upaya ini juga harus dibarengi dengan kualitas tenaga ahli sebagai pembimbing atau instruktur. Tidak hanya itu pemerintah perlu meningkatkan lapangan pekerja dengan cara mendirikan industri industri baru yang bersifat padat karya, serta membatasi penggunaan teknologi yang berpotensi mengurangi penggunaan tenaga kerja manusia.
2. Pemerintah dapat meningkatkan investasi dengan cara pengembangan inovasi teknologi, memperbaiki sarana dan prasarana jalan, memfasilitasi jaringan listrik untuk energi, dan jaringan telekomunikasi untuk transaksi informasi dalam dunia bisnis, serta pemerintah dapat melakukan pembinaan tenaga kerja agar menjadi lebih terampil, disiplin dan mempunyai etos kerja yang tinggi untuk mencapai produktivitas kerja yang makin tinggi. Tidak hanya itu pemerintah perlu menciptakan kebijakan fungsi sektor pembiayaan yang efektif (sistem perbankan dan pasar modal) serta sistem ketenagakerjaan yang kondusif (sistem upah buruh yang adil tetapi tidak memberatkan perusahaan, kontrak

kerja yang jelas, pelarangan demonstrasi buruh, dan lain-lain). Kemudian menciptakan sistem perpajakan dan prosedur perdagangan ekspor-impor dan perdagangan domestik yang mudah dan sederhana, serta menciptakan peraturan perundang undangan yang kondusif dan memberikan perlindungan bagi investor serta prosedur investasi yang jelas, mudah, dan cepat.

3. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu pemerintah perlu menyediakan infrastruktur memadai yang mampu mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dimana ketersediaan infrastruktur yang memadai mampu memicu pertumbuhan ekonomi, melihat Pulau Sumatera sendiri, memiliki infrastruktur dasar yang masih kurang memadai untuk pengembangan industri, seperti kondisi jalan yang sempit dan rusak, rel kereta api yang sudah rusak dan tua, pelabuhan laut yang kurang efisien, serta kurangnya tenaga listrik yang dapat melayani industri serta pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan strategis dan wilayah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Karena pada intinya adalah infrastruktur memegang peranan vital dalam aktivitas ekonomi masyarakat
4. Kebijakan pemerintah dalam menjaga tingkat inflasi agar tetap stabil maka pentingnya bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas uang yang diedarkan di masyarakat, selain itu faktor pendapatan merupakan hal penting dalam menunjang perekonomian suatu negara, maka dari itu untuk menaikan sektor Produk Domestik Bruto (PDB) diperlukan regulasi-regulasi dari pemerintah yang tidak memberatkan para pelaku usaha sehingga perekonomian suatu negara berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB). Tidak hanya itu pemerintah dapat melaksanakan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai *stakeholders*, kemudian memanfaatkan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi, serta penggunaan anggaran belanja tak terduga dalam pengendalian inflasi, serta mengoptimalkan dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk ketahanan pangan, serta pemerintah dapat memperluas kerja sama antar daerah, terutama untuk daerah surplus atau defisit.